

PERAN PENTING EPISTEMOLOGI DALAM ADANYA PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PUBLIK BERBASIS ILMU PENGETAHUAN

Feby Aprelia, Harlinda Eka Suciana, Puan Maharani Hasan, HS Tisnanta, Satria Prayoga

Universitas Lampung, Indonesia

*Corresponding Author:

puanm43@gmail.com

Abstract

Epistemology is a segment of philosophy that investigates the essence, origins, and credibility of knowledge, playing an essential role in the development of public policies anchored in scientific principles. Its significance can be seen in its influence on the ways in which scientific data is gathered, assessed, and employed in choices that have a considerable impact on society. Public policies relying on scientific insights necessitate precise data and comprehension of the methods used to obtain and validate that knowledge. By adopting an epistemological perspective, legislators can differentiate reliable evidence from mere opinions, recognize the constraints of scientific findings, and evaluate the significance of proof in multifaceted social frameworks. This research also illuminates the practical difficulties encountered when implementing policies focused on science, including limited organizational resources, breakdowns in communication between scientists and policymakers, and political factors that might undermine the trustworthiness of data. Consequently, establishing a solid epistemological foundation is vital to ensure that public policies are based on scientific evidence, accountable, flexible, and directed at the welfare of the broader community.

Keywords: epistemology, philosophy of science, public policy, science, scientific evidence

PENDAHULUAN

Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki hakikat, sumber, dan batasan pengetahuan, melampaui teori sederhana; epistemologi memainkan peran krusial dalam membentuk bagaimana mereka yang berkuasa memahami, menganalisis, dan memanfaatkan bukti untuk membentuk kebijakan publik. Bidang ini memunculkan pertanyaan kritis: apa yang dimaksud dengan bukti yang dapat dipercaya, bagaimana bukti ini dibuktikan, dan dalam kondisi apa kita dapat menerima klaim ilmiah sebagai dasar tindakan kolektif? Memahami pertanyaan-pertanyaan ini menetapkan batasan etis dan prosedural bagi pendekatan pembuatan kebijakan yang mengklaim didasarkan pada pemahaman ilmiah, mengingat istilah "berbasis bukti" secara inheren mengandung asumsi epistemologis tentang kredibilitas, kesesuaian, dan universalitas temuan penelitian¹.

Untuk menggambarkan hubungan ini secara efektif, penting untuk digarisbawahi bahwa epistemologi tidak hanya menyediakan kerangka teoretis untuk "pengetahuan" tetapi juga memengaruhi aplikasi praktis: standar untuk apa yang dianggap sebagai bukti yang valid, aturan untuk menetapkan kausalitas, dan metode untuk mengubah pengetahuan menjadi rekomendasi kebijakan. Pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kebijakan publik dapat berfungsi

¹ Muhammad, K., Firdaus, S. U., & La Aci, M. H. (2023). Kebijakan publik dan politik hukum: Membangun demokrasi berkelanjutan untuk masyarakat. *Sovereignty*, 2(4), 354-368.

sebagai mekanisme yang mendukung atau mengancam fondasi demokrasi sangatlah penting. Menciptakan struktur demokrasi yang solid membutuhkan pilihan kebijakan yang transparan dan partisipatif yang mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Epistemologi merupakan segmen penting filsafat yang berfokus pada atribut esensial pemahaman manusia.

Epistemologi melibatkan eksplorasi apa yang membentuk pengetahuan, menjelaskan bagaimana individu memperolehnya, dan mengidentifikasi keterbatasan yang melekat dalam proses perolehan pengetahuan. Dengan demikian, epistemologi tidak hanya mengkaji apa yang kita ketahui tetapi juga meneliti metode untuk mengetahui, dan yang terpenting, sejauh mana kita dapat bergantung pada pengetahuan kita². Melalui perspektif epistemologi, kita dapat mengkaji konsep-konsep seperti kebenaran, keyakinan, skeptisisme, dan proses-proses utama yang mendasari pemahaman manusia tentang lingkungan dan realitas. Kebijakan publik menunjukkan kewenangan pemerintah untuk memenuhi peran dan tanggung jawabnya dalam mengawasi kepentingan masyarakat dan pengelolaan sumber daya. Kebijakan yang ditetapkan harus bertujuan untuk menyelesaikan berbagai isu dan mengambil langkah-langkah efektif.

Dalam ranah tata kelola modern yang kompleks, konsep bahwa kebijakan “harus berbasis bukti” telah muncul sebagai prinsip fundamental. Namun, mewujudkan prinsip ini seringkali terbukti sulit karena adanya kesenjangan antara jenis bukti yang ada dan yang dibutuhkan oleh para pembuat kebijakan. Epistemologi memperjelas spektrum bukti yang tersedia seperti data kuantitatif dari uji coba terkontrol acak, analisis statistik jangka panjang, data kualitatif dari wawancara dan studi kasus, serta pengalaman empiris berdasarkan penerapan praktis dan implikasi dari memprioritaskan satu bentuk bukti sebagai “lebih valid” daripada yang lain. Ketika organisasi atau pembuat kebijakan berfokus terutama pada uji coba terkontrol acak atau bukti statistik sebagai tolok ukur, bentuk pengetahuan lain yang relevan dengan konteks lokal, nilai-nilai budaya, atau pertimbangan etika seringkali terpinggirkan³.

Kritik-kritik ini menunjukkan bahwa pencarian “bukti terbaik” harus menghormati beragam pendekatan dan keadaan, alih-alih hanya berpegang teguh pada kerangka metodologis yang kaku. Pengetahuan muncul dari fungsi kognitif manusia. Kemampuan berpikir kritis membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya. Sangat penting bagi filsafat ilmu untuk mengeksplorasi dan menganalisis fondasi pemahaman ilmiah, memunculkan pertanyaan tentang metode perolehan pengetahuan, ciri-ciri yang mencirikan pengetahuan “ilmiah”, dan dampak sains terhadap dunia.

Kajian filsafat ilmu tidak hanya mengkaji asal-usul eksplorasi ilmiah, tetapi juga bagaimana keyakinan ontologis, epistemologis, dan aksiologis fundamental yang mendasari sains memengaruhinya⁴. Kemajuan sains telah membawa manfaat substansial di berbagai ranah seperti ekonomi, masyarakat, politik, dan sistem pendidikan.

Namun, kemajuan ini juga telah menumbuhkan berbagai bias dan menghadirkan dilema baru. Keuntungan yang dibawa oleh kemajuan ilmiah tidak diakui secara universal, karena setiap perubahan biasanya membawa beragam sudut pandang. Akibatnya, memupuk penalaran yang objektif dan sehat dalam menanggapi perubahan sangatlah penting. Filsafat ilmu merupakan subdivisi tersendiri dari filsafat yang membahas berbagai permasalahan terkait ranah sains. Ilmu pengetahuan telah berkembang pesat dan berdampak signifikan pada kehidupan manusia.

Kemajuan ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan penting mengenai hakikat ilmu pengetahuan, bagaimana ia dipelajari, dan apa batasan-batasannya. Pertanyaan-pertanyaan ini

² Kardina, M., & Ofianto, O. (2023). Kontribusi Epistemologi Filsafat Ilmu dalam Meminimalkan Bias dalam Pengambilan Keputusan Administrasi Negara. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 3296-3305.

³ Hudjolly, H. (2017). Epistemologi Dalam Kebijakan Publik: Kajian Konsep Smart City Di Indonesia. *Untirta Civic Education Journal*, 2(1).

⁴ Syawie, M., & Sumarno, S. (2015). Kebijakan Berbasis Ilmu Pengetahuan. *Sosio Informa*, 1(1).

termasuk dalam bidang yang dikenal sebagai filsafat ilmu⁵. Tujuan ini adalah untuk menekankan pentingnya memahami filsafat ilmu sebagai kajian esensial atas praktik dan hasil-hasil ilmiah. Selain itu, ruang lingkup filsafat ilmu akan diuraikan, meliputi epistemologi (studi tentang perolehan pengetahuan dalam sains), ontologi (eksplorasi realitas yang dikaji oleh sains), dan metodologi (pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan pengetahuan ilmiah).

Pemahaman yang komprehensif tentang signifikansi dan ruang lingkup filsafat ilmu sangat penting tidak hanya bagi para peneliti tetapi juga bagi siapa pun yang mencari wawasan lebih dalam tentang dampak sains terhadap kemanusiaan dan masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas tiga aspek kunci filsafat ilmu: epistemologi, ontologi, dan metodologi⁶. Bagian mengenai epistemologi akan mengeksplorasi bagaimana pengetahuan ilmiah diperoleh, divalidasi, dan dicatat.

Eksplorasi ini akan mempertimbangkan berbagai sudut pandang epistemologis, seperti empirisme, rasionalisme, dan konstruktivisme, serta implikasinya terhadap praktik ilmiah. Bagian tentang ontologi akan mengkaji realitas yang diselidiki sains. Bagian ini akan membahas pertanyaan tentang apakah realitas itu objektif atau subjektif, apakah ada realitas yang independen dari pengamat, dan bagaimana sains merepresentasikan realitas.

Terakhir, bagian metodologi akan berfokus pada berbagai teknik dan strategi yang digunakan dalam penelitian ilmiah, yang mencakup pendekatan kuantitatif dan kualitatif, serta pengaruhnya terhadap pengetahuan yang dihasilkan. Analisis ini akan mencakup evaluasi kritis terhadap kekuatan dan kelemahan masing-masing metode dan panduan dalam memilih metode yang tepat berdasarkan tujuan dan fokus penelitian. Dengan memahami ketiga komponen ini, kita dapat memperoleh perspektif yang lebih lengkap tentang filsafat sains dan perannya dalam memperdalam pemahaman kita tentang alam semesta.

Epistemologi, sebagai ranah filsafat yang mempelajari hakikat pengetahuan⁷, menyediakan kerangka kerja teoretis yang relevan untuk memahami proses transfer teknologi dalam konteks global. Dalam ranah transfer teknologi, epistemologi menjelaskan bagaimana pengetahuan teknologi diperoleh, divalidasi, dan dikembangkan. Isu penting lainnya adalah kompleksitas sistem sosio-ekologis yang memainkan peran krusial dalam pembuatan kebijakan. Berbagai isu sosial, termasuk perubahan iklim, resistensi terhadap antimikroba, dan kemiskinan multidimensi, menunjukkan kerumitan berlapis, perilaku dinamis, dan saling keterkaitan.

Model mental yang lugas atau bukti yang terfragmentasi tidak memadai untuk mengatasi masalah ini; diperlukan pendekatan kebijakan holistik yang mengakui ketidakpastian, interkoneksi antar sektor, dan pentingnya mengintegrasikan berbagai jenis bukti. Menyusun kebijakan yang efektif dan fleksibel bergantung pada pemikiran sistemik dan dialog tentang penggabungan data, teori, dan pengalaman nyata, meskipun hal ini cukup menantang.

Selain itu, relevansi epistemologi melampaui percakapan teoretis dan mencakup kerangka kerja kelembagaan dan normatif: fondasi epistemologis yang kuat bagi para pembuat kebijakan meningkatkan transparansi terkait klaim bukti (termasuk pengakuan ketidakpastian), mendorong keragaman metodologis (dengan menilai berbagai sumber pengetahuan), memfasilitasi dialog dengan para pemangku kepentingan, dan menjamin akuntabilitas dalam pemilihan dan penggunaan bukti⁸.

⁵ Asih, D. B., & Nugraha, M. S. (2025). Integrasi Epistemologi Islam dalam Pengembangan Kebijakan Pendidikan Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(8. B), 46-66

⁶ Santoso, P., & Promotor, C. (2019). Transformasi Noise menjadi Voice: Politik Keterbukaan Pengetahuan dalam Kekinian Diskursus Evidence Based Policy di Indonesia

⁷ Oktaviani, F. N., Ulfa, D. M., & Winarno, A. (2024). Peran Ilmu Pengetahuan dalam Perkembangan Penelitian Ilmiah. *Jurnal Bintang Manajemen*, 2(4), 141-150

⁸ Rustandi, F., Nugraha, H., Munawaroh, C., & Hambali, A. (2025). Hakikat Ilmu Pengetahuan dalam Era AI: Mempertahankan Integritas Epistemologi di Tengah Automasi. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)* e-ISSN 2745-5955| p-ISSN 2809-0543, 6(2), 296-307

Tanpa memperhatikan faktor-faktor epistemologis tersebut, klaim "kebijakan berbasis sains" berisiko menjadi formalitas belaka sebuah prosedur resmi yang menghambat diskusi krusial tentang nilai-nilai dan interpretasi data yang esensial bagi pembentukan kebijakan publik yang efektif dan demokratis. Studi ini akan mengkaji secara mendalam peran epistemologi, menghubungkannya dengan tantangan praktis yang teridentifikasi, dan menawarkan wawasan tentang bagaimana para pembuat kebijakan, peneliti, dan masyarakat sipil dapat bekerja sama untuk memperkuat fondasi epistemik kebijakan publik yang sungguh-sungguh didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah.

METODE PENELITIAN

Strategi yang diadopsi dalam studi ini melibatkan tinjauan komprehensif terhadap karya akademis yang tersedia. Analisis ini menyoroti pentingnya epistemologi dalam menyusun kebijakan publik yang berbasis sains, dengan mempertimbangkan perkembangan terkini di bidang filsafat sains. Informasi dikumpulkan menggunakan berbagai laporan, karya sastra, dan artikel jurnal penting yang relevan dengan penelitian ini atau analisis konten (Mor dkk., 2015).

Teknik khusus ini dipilih karena studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi, memahami, dan mengkaji konsep-konsep yang berkaitan dengan filsafat sains, dengan fokus khusus pada epistemologi dan dampaknya terhadap pengembangan kebijakan publik berbasis sains.

Metodologi ini dianggap tepat karena topik yang dibahas bersifat konseptual, teoretis, dan normatif, sehingga membutuhkan investigasi mendalam terhadap literatur ilmiah yang relevan. Sumber data yang digunakan dalam studi ini terbagi dalam dua kategori utama: data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari teks-teks filsafat kunci tentang epistemologi, termasuk karya-karya Plato, Aristoteles, Immanuel Kant, dan Karl Popper, serta para filsuf kontemporer yang terlibat dalam diskusi epistemologi ilmiah.

Sebaliknya, data sekunder dikumpulkan dari literatur tentang filsafat ilmu, jurnal akademik, makalah penelitian, dokumen hukum, dan catatan kebijakan yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan publik. Lebih lanjut, para peneliti memasukkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan untuk memperkuat analisis mereka dan mendukung argumen-argumen yang diajukan dalam penelitian ini⁹.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan tinjauan pustaka yang komprehensif. Langkah pertama meliputi identifikasi literatur yang relevan dengan topik penelitian melalui penelusuran pustaka, basis data jurnal ilmiah, dan platform akademik daring. Setelah itu, literatur diurutkan berdasarkan signifikansi, kredibilitas, dan kontribusinya terhadap tema penelitian. Setiap literatur dianalisis secara menyeluruh untuk mengidentifikasi konsep, teori, argumen, dan wawasan kunci terkait hubungan antara epistemologi dan pengembangan kebijakan publik. Semua informasi yang terkumpul kemudian dikategorikan secara tematis, termasuk konsep inti epistemologi, interaksi antara epistemologi dan sains, serta penerapan epistemologi dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Pendekatan penelitian ini memungkinkan investigasi yang menyeluruh dan mendalam mengenai peran krusial epistemologi dalam pembentukan kebijakan publik berbasis sains. Hasil yang diharapkan bertujuan untuk memberikan wawasan baru mengenai bagaimana pengetahuan ilmiah seharusnya diintegrasikan ke dalam pengambilan keputusan publik dan menunjukkan peran penting epistemologi dalam memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan berbasis sains, akuntabel, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

⁹ Masula, F., Aini, N. Q., & Winarno, A. (2025). Eksplorasi Kritis: Pengaruh Teori Positivisme dan Teori Kritis Dalam Pembentukan Kebijakan Publik Melalui Systematic Literature Review. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 9(3), 842-850.

HASIL PEMBAHASAN

Epistemologi adalah bidang filsafat yang didedikasikan untuk mengkaji hakikat, asal-usul, batasan, dan validitas pengetahuan, yang memainkan peran krusial dalam memengaruhi konsep manusia tentang kebenaran dan proses memperoleh pengetahuan yang andal¹⁰.

Dalam konteks kebijakan publik, epistemologi sangat memengaruhi pendekatan tentang bagaimana informasi dikumpulkan, diproses, dievaluasi, dan diubah menjadi keputusan yang berdampak luas pada masyarakat. Inisiatif yang mengklaim berbasis "sains" pada dasarnya bergantung pada prinsip-prinsip epistemologis karena beroperasi dengan asumsi bahwa kebijakan yang sukses harus didasarkan pada pengetahuan yang valid, relevan, dan dapat diuji. Oleh karena itu, memahami epistemologi bukan sekadar isu teoretis, tetapi penting untuk mengembangkan kebijakan yang efektif, rasional, dan berkelanjutan.

Dari perspektif praktis, epistemologi mendefinisikan apa yang dimaksud dengan "pengetahuan" dalam percakapan tentang kebijakan publik. Ini mencakup pertanyaan tentang jenis pengetahuan apa yang tepat untuk memengaruhi keputusan, keandalan data ilmiah, dan bagaimana membedakan antara opini pribadi, keyakinan, dan bukti ilmiah yang telah mapan. Misalnya, ketika menyusun kebijakan kesehatan, para pengambil keputusan perlu mengevaluasi relevansi epistemik temuan dari studi laboratorium, uji klinis, atau penelitian kesehatan masyarakat untuk pengembangan kebijakan. Bidang epistemologi menegaskan bahwa tidak semua informasi memiliki tingkat kredibilitas yang sama. Bukti yang diperoleh melalui metode ilmiah yang tervalidasi dan dapat direplikasi, serta didukung oleh observasi dunia nyata, lebih berwibawa secara epistemik daripada keyakinan individu atau teori yang belum terkonfirmasi. Sederhananya, epistemologi menyediakan kerangka kerja untuk membedakan antara pengetahuan yang valid dan yang kurang kredibel¹¹.

Signifikansi epistemologi semakin meningkat, terutama terkait dengan isu-isu sosial kompleks yang dihadapi berbagai negara saat ini. Tantangan seperti perubahan iklim, kemiskinan kronis, ketimpangan ekonomi, resistensi antibiotik, dan krisis kesehatan global tidak dapat diatasi hanya melalui insting atau coba-coba. Permasalahan ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang hubungan sebab-akibat, interaksi berbagai elemen, dan dampak jangka panjang dari suatu kebijakan.

Oleh karena itu, kerangka epistemologis yang solid diperlukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara efektif, memastikan kebijakan bertujuan mengatasi permasalahan inti, alih-alih sekadar menangani gejala-gejala permukaan. Epistemologi menawarkan prinsip-prinsip metodologis yang mendukung para pembuat kebijakan dalam memastikan strategi mereka tidak hanya didasarkan pada bukti, tetapi juga pada pemahaman komprehensif tentang bagaimana bukti tersebut dikumpulkan dan implikasinya¹².

Pengetahuan ilmiah memerlukan lebih dari sekadar observasi dan eksperimen; pengetahuan ilmiah menuntut perenungan mendalam tentang bagaimana pengetahuan tersebut dapat dianggap andal, teruji, dan diterima oleh komunitas ilmiah. Sementara ontologi mengkaji pertanyaan tentang eksistensi, epistemologi berusaha mengklarifikasi proses kemunculan dan

¹⁰ Reyvani, D., Sari, I. D., Yuanita, P., & Zein, A. W. (2025). Pengertian Filsafat Ilmu dan Ruang Lingkup Filsafat Ilmu. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(1), 502-512

¹¹ Abas, M., Purnama, W. W., Ramadianto, A. Y., Effendy, F. S. W., Bagus, M., Anggraeni, R., ... & Ihsan, M. (2023). Ilmu hukum konseptualisasi epistemologi prinsip hukum dalam konstitusi negara.

¹² Nurhidayati, S., Rosada, M., Lubis, M., & Sidik, A. (2025). Analisis Epistemologis Terhadap Kriteria Mufassir: Telaah Atas Sumber, Metode Dan Validitas Ilmu Dalam Perspektif Ushul Al-Tafsir. *AT-TAISIR: Journal of Indonesian Tafsir Studies*, 6(1), 129-145

kebenaran sains. Landasan epistemologis sangat penting bagi kerangka pengetahuan, bertindak sebagai penopang fundamental yang memastikan pengetahuan yang valid dan kokoh.

Sains merupakan hasil dari upaya manusia yang terkoordinasi yang berfokus pada pemahaman dunia alami, masyarakat, dan pengalaman manusia melalui metode yang berlandaskan akal dan data yang dapat diamati. Konsep ini menangkap karakter esensial sains, yang melibatkan pandangan terpadu tentang realitas yang dapat disampaikan melalui penalaran logis dan protokol eksperimental (Dewi dkk., 2024).

Ontologi ilmiah modern menekankan bahwa sains melampaui sekadar pengumpulan data; sains berfungsi sebagai struktur kritis yang melaluinya individu dapat mengorganisasikan informasi secara metodis. Sebagai suatu upaya rasional, sains berkembang dengan meneliti hipotesis-hipotesis yang sesuai dengan realitas yang dipahami. Pendekatan ini memperjelas fungsi inti sains sebagai sarana bagi manusia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai esensi, tujuan, dan signifikansi semua peristiwa.

Menurut Hambali, Herniawati, dan Hidayat (Hambali dkk., 2024), filsafat ilmu berperan krusial dalam mendefinisikan batasan dan kerangka kerja praktik ilmiah, memastikan metodologi ilmiah tetap relevan dan etis di tengah perkembangan teknologi yang sedang berlangsung¹³.

Untuk memahami kebijakan sosial sebagai reaksi terhadap permasalahan sosial, perlu dikaji berbagai aspek kebijakan sosial, setidaknya pada tataran konseptual. Eksplorasi ini bertujuan untuk mengungkap potensi kebijakan sosial dalam mengatasi tantangan sosial (Soetomo, 2011).

Pengetahuan adalah tindakan mengembangkan pemikiran yang mengaitkan atau menghubungkan konsep dengan realitas atau gagasan lain berdasarkan pengalaman berulang, tanpa pemahaman mendalam tentang hubungan sebab-akibat yang benar dan universal. Sebaliknya, sains adalah kumpulan pengetahuan terstruktur yang menjelaskan hubungan sebab-akibat yang benar dan universal mengenai suatu objek, menggunakan metodologi spesifik untuk menciptakan kerangka kerja yang terorganisir (Adnan Indra Muchlis, 2020).

Pada dasarnya, pengetahuan merepresentasikan kondisi kognitif yang memungkinkan seseorang memahami sesuatu dengan membentuk opini tentang suatu objek, atau, dengan kata lain, membangun gambaran tentang fakta-fakta yang ada di luar kesadaran mereka. Seiring waktu, pengetahuan berevolusi dari rasa ingin tahu, sebuah sifat manusia yang unik, karena manusia secara unik memiliki kemampuan untuk mengembangkan pengetahuan yang luas, tidak seperti makhluk lain yang hidup dengan keterbatasan intrinsik untuk bertahan hidup (Situmeang, 2021). Sains dapat diartikan sebagai pengetahuan yang diperoleh melalui pendekatan yang sistematis, logis, dan tervalidasi secara empiris. Tujuan sains adalah memahami, menjelaskan, dan meramalkan berbagai fenomena di alam semesta, yang mencakup aspek fisik dan sosial¹⁴.

Dalam ranah filsafat sains, fokusnya tidak hanya pada fakta atau data yang dikumpulkan, tetapi juga pada metodologi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengembangkan, dan menguatkan pengetahuan tersebut. Filsafat sains berkontribusi dalam menilai peran sains dalam meningkatkan pemahaman manusia menuju kebenaran.

Hal ini dicapai melalui penilaian kritis terhadap semua pengetahuan, sambil berupaya mencari jawaban yang benar. Evaluasi semacam itu harus dilakukan dengan cermat dan dengan pertimbangan yang matang (Santi dkk., 2022). Filsafat sains berperan penting dalam kemajuan

¹³ Fizikri, L. (2025). Telaah Epistemologis dan Validitas Penafsiran dalam Tafsir Al-Munir Karya Syekh Djalaluddin Thaib. *At-Tasyrih: jurnal pendidikan dan hukum Islam*, 11(1), 441-460

¹⁴ Sari, V. R., Lestari, N. B., Buana, T. C., Rahma, N., Rianda, V., Aisyah, A., ... & Athaya, N. S. Tinjauan Epistemologi dalam Konteks Globalisasi: Transfer Pengetahuan dan Adaptasi Teknologi di Indonesia

sains dengan memfasilitasi integrasi interdisipliner, menetapkan batasan etika, dan memperluas perspektif tentang evolusi sains yang berkelanjutan¹⁵.

Fungsi ini memposisikan filsafat sains sebagai landasan reflektif bagi berbagai bidang ilmiah, yang memungkinkan mereka untuk berkembang dengan tanggung jawab dan tujuan yang lebih besar. Epistemologi sains adalah bidang filsafat yang berfokus pada pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai pengetahuan ilmiah, termasuk bagaimana pengetahuan tersebut diperoleh, dipelihara, dan diautentikasi. Dalam lingkup penyelidikan ilmiah, epistemologi sains sangat penting karena mendasari bagaimana peneliti mengumpulkan data, menyusun hipotesis, menguji teori, dan memperluas pengetahuan¹⁶.

KESIMPULAN

Epistemologi sangat penting dalam membentuk kebijakan publik yang didasarkan pada pemahaman ilmiah dengan menyediakan gagasan dan metode fundamental yang diperlukan untuk mengidentifikasi pengetahuan yang valid bagi pengambilan keputusan. Dalam ranah kebijakan publik, epistemologi membantu memahami bagaimana pengetahuan dikumpulkan, dikonfirmasi, diterapkan, dan diubah menjadi pilihan-pilihan yang memengaruhi masyarakat. Kebijakan publik yang sehat, logis, dan berkelanjutan seharusnya bergantung pada informasi yang tervalidasi secara ilmiah, alih-alih sekadar opini, keyakinan, atau pengaruh politik.

Tantangan signifikan yang dihadapi dalam praktik meliputi kesenjangan yang berkelanjutan antara data ilmiah yang ada dan kebijakan yang dirumuskan, kegagalan komunikasi antara sektor ilmiah dan para pengambil keputusan, sumber daya yang tidak memadai untuk menafsirkan dan memanfaatkan temuan ilmiah, serta politisasi pengetahuan, yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan berbasis sains.

Epistemologi menawarkan kerangka kerja untuk mengatasi masalah-masalah ini dengan menekankan keragaman pendekatan ilmiah, perlunya penyesuaian kontekstual, dan pentingnya metode yang efektif untuk berbagi pengetahuan. Lebih lanjut, epistemologi membantu meningkatkan kredibilitas dan keyakinan publik terhadap kebijakan melalui proses pengambilan keputusan yang transparan dan berbasis bukti yang mengakui ketidakpastian ilmiah. Dengan membangun fondasi epistemologis yang kuat, para pembuat kebijakan dapat merancang inisiatif yang lebih efektif dalam mengatasi tantangan sosial yang kompleks seperti perubahan iklim, kedaruratan kesehatan masyarakat, kemiskinan, dan kesenjangan ekonomi.

Singkatnya, epistemologi berfungsi tidak hanya sebagai landasan teoretis bagi sains, tetapi juga sebagai komponen praktis yang memengaruhi kecukupan, efektivitas, dan keberlangsungan kebijakan publik. Tanpa fondasi epistemologis yang kuat, pernyataan kebijakan yang berbasis sains kurang mendalam dan dapat direduksi menjadi sekadar tindakan administratif.

Oleh karena itu, mengintegrasikan pertimbangan epistemologis ke dalam pembuatan kebijakan merupakan langkah penting menuju pembentukan kebijakan publik yang pada dasarnya ilmiah, adil, dan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat.

¹⁵ Niam, M. (2024). Menyelami Lautan Tafsir: Epistemologi dan Pendekatan Syi'ah dalam Memahami Al-Qur'an. *Qur'anic Interpretation Journal*, 1(1), 93-108.

¹⁶ Sejati, A. E., Sugiarto, A., Anasi, P. T., Utaya, S., & Bachri, S. (2022). Tantangan filsafat geografi dalam perkembangan geografi terkini: Kajian ontologi, epistemologi, aksiologi, dan etika. *Majalah Geografi Indonesia*, 36(2), 126-134.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, M., Purnama, W. W., Ramadianto, A. Y., Effendy, F. S. W., Bagus, M., Anggraeni, R., ... & Ihsan, M. (2023). Ilmu Hukum Konseptualisasi Epistemologi Prinsip Hukum Dalam Konstitusi Negara.
- Asih, D. B., & Nugraha, M. S. (2025). Integrasi Epistemologi Islam Dalam Pengembangan Kebijakan Pendidikan Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(8. B), 46-66.
- Fizikri, L. (2025). Telaah Epistemologis Dan Validitas Penafsiran Dalam Tafsir Al-Munir Karya Syekh Djalaluddin Thaib. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 11(1), 441-460.
- Hudjolly, H. (2017). Epistemologi Dalam Kebijakan Publik: Kajian Konsep Smart City Di Indonesia. *Untirta Civic Education Journal*, 2(1).
- Kardina, M., & Ofianto, O. (2023). Kontribusi Epistemologi Filsafat Ilmu Dalam Meminimalkan Bias Dalam Pengambilan Keputusan Administrasi Negara. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 3296-3305.
- Masula, F., Aini, N. Q., & Winarno, A. (2025). Eksplorasi Kritis: Pengaruh Teori Positivisme Dan Teori Kritis Dalam Pembentukan Kebijakan Publik Melalui Systematic Literature Review. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 9(3), 842-850.
- Muhammad, K., Firdaus, S. U., & La Aci, M. H. (2023). Kebijakan Publik Dan Politik Hukum: Membangun Demokrasi Berkelanjutan Untuk Masyarakat. *Sovereignty*, 2(4), 354-368.
- Niam, M. (2024). Menyelami Lautan Tafsir: Epistemologi Dan Pendekatan Syi'ah Dalam Memahami Al-Qur'an. *Qur'anic Interpretation Journal*, 1(1), 93-108.
- Nurhidayati, S., Rosada, M., Lubis, M., & Sidik, A. (2025). Analisis Epistemologis Terhadap Kriteria Mufassir: Telaah Atas Sumber, Metode Dan Validitas Ilmu Dalam Perspektif Ushul Al-Tafsir. *At-Taisir: Journal Of Indonesian Tafsir Studies*, 6(1), 129-145.
- Oktaviani, F. N., Ulfa, D. M., & Winarno, A. (2024). Peran Ilmu Pengetahuan Dalam Perkembangan Penelitian Ilmiah. *Jurnal Bintang Manajemen*, 2(4), 141-150.
- Reyvani, D., Sari, I. D., Yuanita, P., & Zein, A. W. (2025). Pengertian Filsafat Ilmu Dan Ruang Lingkup Filsafat Ilmu. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(1), 502-512.
- Rustandi, F., Nugraha, H., Munawaroh, C., & Hambali, A. (2025). Hakikat Ilmu Pengetahuan Dalam Era Ai: Mempertahankan Integritas Epistemologi Di Tengah Automasi. *Journal Scientific Of Mandalika (Jsm) E-Issn 2745-5955| P-Issn 2809-0543*, 6(2), 296-307.
- Santoso, P., & Promotor, C. (2019). Transformasi Noise Menjadi Voice: Politik Keterbukaan Pengetahuan Dalam Kekinian Diskursus Evidence Based Policy Di Indonesia.
- Sari, V. R., Lestari, N. B., Buana, T. C., Rahma, N., Rianda, V., Aisyah, A., ... & Athaya, N. S. Tinjauan Epistemologi Dalam Konteks Globalisasi: Transfer Pengetahuan Dan Adaptasi Teknologi Di Indonesia.
- Sejati, A. E., Sugiarto, A., Anasi, P. T., Utaya, S., & Bachri, S. (2022). Tantangan Filsafat Geografi Dalam Perkembangan Geografi Terkini: Kajian Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, Dan Etika. *Majalah Geografi Indonesia*, 36(2), 126-134.
- Syawie, M., & Sumarno, S. (2015). Kebijakan Berbasis Ilmu Pengetahuan. *Sosio Informa*, 1(1).